

KONSTRUKSI POLITIK IDENTITAS MELALUI VISUAL FOTOGRAFI (STUDI ANALISA PESAN VISUAL PAUL MARTIN LESTER PADA FOTO DEKLARASI KEMENANGAN JOKO WIDODO DAN KH MA'RUF AMIN)

Ignasius Liliek Senaharjanta
Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora
Universitas Bunda Mulia Kampus Serpong
Surel: ignatiusliliekg@gmail.com

Abstrak

Politik Indonesia saat ini mengarah kepada politik identitas. Pertarungan wacana politik identitas sangat kental terjadi pada Pemilu 2019. Hal tersebut menjadi indikasi bahwa politik identitas di Indonesia saat ini dimanfaatkan sebagai strategi untuk mencapai atau memenangkan kontestasi pemilu. Berbagai upaya tersebut dilakukan dengan memanfaatkan berbagai media, salah satu media yang digunakan adalah medium visual fotografi. Fotografi digunakan sebagai saluran kampanye, hal tersebut karena medium visual ini dinilai memiliki kekuatan untuk membentuk opini di tengah masyarakat. Berdasarkan hal tersebut maka penelitian ini ingin mengetahui makna pesan pada foto deklarasi kemenangan Joko Widodo-Ma'ruf Amin. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Data pada penelitian ini dilakukan dengan menganalisa foto deklarasi kemenangan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden, Joko Widodo dan KH. Ma'ruf Amin. Foto deklarasi tersebut dianalisa dengan enam perspektif analisa pesan visual Paul Martin Lester. Hasil penelitian menunjukkan bahwa makna foto deklarasi kemenangan calon Presiden dan Wakil Presiden, Joko Widodo dan KH Ma'ruf Amin adalah foto tersebut tampaknya pasangan ingin mengusung pesan identitas nasionalis religius atau Islam nusantara yang dekat dengan rakyat. Kedekatan dengan rakyat yang berada dipemukiman padat penduduk merupakan bentuk sikap keberpihakan kepada masyarakat kelas bawah

Kata kunci: politik identitas, analisa pesan visual, Joko Widodo, KH M'aruf Amin

Abstract

Indonesian politics currently leads to identity politics. The fight against identity politics is very strong in the 2019 General Election. It is an indication that identity politics in Indonesia is currently utilized as a strategy to achieve or win election contests. These efforts are made by utilizing various media, one of the media used is the visual medium of photography. Photography is used as a campaign channel, this is because this visual medium is considered to have the power to form opinions in the community. Based on this, this research wants to know the meaning of the message in the photo of Joko Widodo-Ma'ruf Amin's victory declaration. This research uses a qualitative approach. The data on this study was done by analyzing photos of the victory declarations of the spouses of presidential candidates and vice presidents, Joko Widodo and KH. Ma'ruf Amin. The photo of the declaration was analyzed with six perspectives of Paul Martin Lester's visual message analysis. The results showed that the meaning of the presidential and vice presidential candidate's declaration of victory, Joko Widodo and KH Ma'ruf Amin is that it appears that the couple wanted to carry a message of religious nationalist identity or Islam of the archipelago that is close to the people. Proximity to people in densely populated communities is a form of impartiality towards lower class communities.

Keywords: political identity, analysis visual message, Joko Widodo, KH M'aruf Amin

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai sebuah negara yang merdeka memiliki pengalaman yang panjang dalam mengadopsi sistem demokrasi modern. Sejarah mencatat sedikitnya Indonesia telah melaksanakan Pemilu sebanyak 12 kali, yaitu pada 1955, 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, 1997, 1999, 2004, 2009, 2014, dan 2019. Pelaksanaan Pemilu yang diselenggarakan dalam rangka suksesi kepemimpinan nasional, memilih kepala daerah dan memilih anggota parlemen tersebut tidak pernah luput dari dinamika politik dan tarik ulur persaingan strategi politik demi kepentingan masing-masing partai. Bahkan, persaingan politik antar partai yang kerap mengarah ke konflik ini sudah dimulai sejak Indonesia untuk kali pertama mencoba melakukan proses demokrasi. Hal tersebut terjadi seperti pada pelaksanaan Pemilu yang dilakukan Indonesia pada 1955 dimana arena persaingan empat partai besar seperti PNI, PKI, Masyumi, dan NU terasa begitu kental untuk berlomba-lomba menanamkan ideologi partai dalam wacana yang dilakukan ditengah masyarakat.

Menurut Maarif (2010:20), latar belakang politik identitas yang terjadi di Indonesia berkisar pada tiga aspek yaitu etnisitas, agama dan ideologi. Ketiga aspek latar belakang tersebut muncul antara lain , karena didasari adanya ketidakpuasan yang dirasakan masyarakat terhadap kebijakan politik penguasa. Munculnya politik identitas dari latar belakang etnis dapat dilihat dari maraknya gerakan-gerakan separatis berbasis kedaerahan yang membawa identitas daerah asal seperti Gerakan Aceh Merdeka, Gerakan Papua Merdeka, Republik Maluku Selatan. Bahkan, munculnya tuntutan pemekaran suatu daerah tertentu menjadi Propinsi dan Kabupaten baru juga dinilai sebagai

bentuk politik identitas berlatar belakang etnisitas. Selain itu, DI/TII yang bergerak di Jawa Barat, Sulawesi dan Aceh merupakan gerakan separatis yang menggunakan agama sebagai ideologi politik identitas. Sedangkan, dari aspek ideologi, Indonesia mengalami pemberontakan yang di Madiun pada tahun 1948 oleh Partai Komunis Indonesia (PKI) yang membawa ideologi Marxisme sebagai politik identitasnya (Maarif, 2010:20).

Politik identitas yang membawa latar belakang ideologis seperti Islamisme, Sosialisme dan Marhaenisme tersebut mulai surut seiring dengan runtuhnya kekuasaan Presiden Soekarno. Surutnya politik identitas juga disebabkan karena pemerintah otoritarian Orde Baru di era kepemimpinan Presiden Soeharto lebih menerapkan gaya politik yang sentralistik dan hegemonik. Praktek-praktek ancaman dan tindakan represi dengan pendekatan keamanan dipilih sebagai alat yang dianggap efektif untuk meredam perbedaan dan dapat menjamin keberlangsungan pembangunan yang membutuhkan stabilitas nasional. Gaya kepemimpinan yang kerap mengarahkan kebijakan ke gerakan penyeragaman nasional selalu dilakukan oleh rezim Orde Baru. Sehingga, hal ini telah menggeser peran nilai dalam Pancasila, yang semula dimaknai sebagai simbol persatuan bergeser menjadi simbol otoritas, dimana segala tindakan ketertiban dimaknai sebagai bagian untuk menjaga kestabilan politik dan keamanan nasional.

Lengsernya kepemimpinan Presiden Soeharto setelah 32 tahun berkuasa dimaknai sebagai era demokrasi baru di Indonesia. Euforia kebebasan yang lahir pada era Reformasi ini memberikan peluang kembali bagi berkembangnya politik identitas dengan munculnya

sejumlah kekuatan politik berideologi Islam (Soejatmiko, 2010:73). Politik identitas memperoleh momentum untuk kembali tampil pada kancah politik di tanah air. Berbagai aspirasi politik yang dulu tertutup, kini menjadi lebih terbuka. Namun demikian, bangkitnya politik identitas di era-reformasi tidak diimbangi dengan kedewasaan kelompok-kelompok masyarakat untuk menerima perbedaan. Kehadiran politik identitas justru mengarah pada anti-Pancasila, anti-demokrasi dan anti-pluralisme (Soejatmiko, 2010:76).

Kekuatan utama dari kelompok politik identitas yang membawa latar belakang agama tersebut berasal dari kelompok fundamentalis. Kelompok fundamentalis ini memiliki tujuan utama yaitu memperjuangkan pelaksanaan Syaria'ah Islam dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Salah satu aksi yang kerap dilakukan oleh kelompok ini adalah dengan memberikan tekanan-tekanan kepada kelompok minoritas yang dianggap sebagai kelompok sesat dan menyimpang. Gerakan politik identitas ini tidak saja mendapatkan dukungan dari kelompok fundamentalis dalam negeri tetapi juga mendapatkan dukungan secara transnasional. Sehingga, gerakan politik identitas tersebut semakin mengukuhkan langkah untuk memperjuangkan kepentingannya.

Praktek politik praktis ormas Islam dilakukan dengan memberikan dukungan kepada calon pemimpin Muslim yang dianggap dapat mengakomodir dan memperjuangkan cita-cita mereka. Dukungan politik secara terbuka terhadap salah satu tokoh nasional oleh ormas ditunjukkan pada saat Pemilu 2004. Pada saat itu FPI mendukung Wiranto sebagai calon Presiden. Bentuk dukungan yang dilakukan ormas tersebut adalah dengan

mengirimkan dai-dai ke berbagai daerah di Indonesia untuk mendiskreditkan Susilo Bambang Yudhoyono yang juga mencalonkan diri sebagai Presiden dan menjadi calon terberat bagi Wiranto. Dukungan lainnya yang diberikan ormas Islam pada kontestasi Pemilu 2019 diberikan kepada pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden, Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno.

Pertarungan antara pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden, Joko Widodo dan KH Ma'ruf Amin, dan pasangan calon Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno pada Pemilu 2019 berjalan sangat ketat. Isu utama pada pemilu tersebut berkisar pada politik identitas berlatar belakang agama yang sangat kental. Sentimen agama, ras dan ideologi kerap digunakan dan dimanfaatkan oleh masing-masing calon untuk diskreditkan lawan. Dalam kontestasi pemilu isu tersebut disebarkan ke berbagai macam media. Salah satu media yang digunakan adalah medium visual fotografi. Penggunaan fotografi sebagai salah satu media kampanye disebabkan karena medium visual ini dinilai memiliki kekuatan untuk membentuk opini ditengah masyarakat. Menurut Sontag (2005:5) hal tersebut karena fotografi telah memberikan informasi yang lebih baik, dan akurat bila dibandingkan dengan teks. Pernyataan tersebut sejalan dengan Ogilvy (2007:76) yang menjelaskan bahwa sebuah foto mampu "berbicara" mewakili dirinya sendiri, mengungkapkan ide yang ada dalam dirinya dan bahkan dapat mewakili ribuan kata.

Fotografi sendiri sejak awal ditemukannya memiliki pengertian melukis atau menggambar dengan cahaya. Cahaya merupakan "nyawa" dan menjadi elemen yang sangat penting dalam fotografi. Sedangkan, melukis atau menggambar

dengan cahaya memiliki pengertian memilih dan melihat objek dengan menggunakan lensa kamera. Berdasarkan hal tersebut maka bagian terpenting lainnya dari fotografi selain daripada cahaya adalah melihat objek secara fotografis.

Sebuah karya fotografi merupakan hasil dari penglihatan fotografis dari fotografer. Dalam proses melahirkan karya fotografi pada umumnya fotografer akan menjalani beberapa proses tahapan yaitu: Pertama, Proses produksi yaitu pemotretan, Kedua, Pasca produksi yaitu proses kamar gelap untuk foto analog atau kamar terang untuk digital, Ketiga, Tahapan terakhir berupa penampilan akhir dari hasil pemotretan. Pada setiap proses yang dilakukan fotografer diatas memiliki tingkatan estetika tersendiri baik yang bersifat ideasional maupun teknikal (Soedjono, 2007:5). Tampilan estetis baik dari aspek ideasional maupun teknikal inilah yang menjadi ciri dari pribadi fotografer. Tataran ide dan konsep merupakan pijakan utama bagi proses pembentukan kreatif estetis. Namun demikian, bila ditelaah lebih lanjut tidak semua praktek dalam fotografi berdasarkan idealisme fotografer pada tataran ide dan tehnikal. Bahkan, banyak dijumpai fotografer terkadang hanya berfungsi hanya sebagai pekerja yang berada dibelakang kamera. Aspek ide dan tehnikal diatur serta dibentuk menurut keinginan dari klien atau orang yang menggunakan jasa fotografer tersebut.

Pada posisi ini fotografi dinilai sebagai sebuah medium visual yang diarahkan untuk kepentingan komoditas. Hal tersebut sejalan dengan Soedjono (2007:124) menyatakan:

Karya-karya foto merupakan medium yang dirancang memiliki standar tertentu untuk meraih kepentingan

dan tujuan yang bernilai. Standar yang diharapkan memang telah ditentukan sebelumnya sehingga ketika karya tersebut telah tercipta diharapkan dapat memenuhi selera atau parameter yang sesuai dengan kualitas kebutuhan kebutuhan penghadirannya.

Beberapa praktek dalam fotografi mengarah pada bentuk-bentuk yang demikian, foto-foto dirancang melalui konsep tertentu sebagai unsur visual yang dipergunakan sebagai pendukung dari produk baru yang ingin dipromosikan atau memperkenalkan tokoh tertentu kepada masyarakat. Dalam konteks politik foto-foto tersebut diimplementasikan dalam berbagai bentuk dan format. Bahkan, tidak jarang foto-foto tersebut diproduksi untuk kepentingan publikasi di media. Para tokoh pejabat yang sebelumnya sudah dikenal oleh masyarakat pun melakukan hal yang sama seperti foto yang menampilkan kepala-kepala daerah dengan menggunakan seragam dinas mereka dan dipasang menggunakan papan reklame di jalan-jalan.

Foto-foto tersebut tentunya memiliki maksud dan tujuan ingin menyampaikan pesan melalui medium visual. Karya fotografi yang sejajar dengan karya visual lainnya merupakan karya yang dapat dimaknai atau diinterpretasi sesuai dengan konteks dan keberadaannya sebagai medium visual. Weston (1966:161) menyatakan bahwa tantangan dalam fotografi adalah bukan soal mengelola kamera dengan berbagai fitur yang canggih, namun melihat objek secara fotografis menterjemahkan elemen dan nilai dalam adegan atau sebuah event yang ada di hadapannya menjadi sebuah karya foto. Berdasarkan hal tersebut maka penelitian ini ingin mengetahui apa makna

pesan pada foto deklarasi kemenangan Joko Widodo-Maaruf Amin?

Menurut beberapa literatur istilah politik identitas muncul kali pertama pada era 1970 an. Latar belakang kemunculan politik identitas disebabkan oleh maraknya pergolakan sosial politik yang dilakukan oleh orang Amerika-Afrika. Pergolakan sosial yang muncul secara massif dari berbagai kelompok tersebut menuntut kebebasan dan kesetaraan (Afala, 2018:6). Sementara itu, Maarif (2010:4) menambahkan, bahwa gerakan politik identitas bermula dari aksi mahasiswa anti kekerasan yang pada waktu itu dikenal dengan *The Student Nonviolent Coordinating Committee* (SNCC). Organisasi tersebut merupakan organisasi gerakan yang memperjuangkan hak-hak sipil. Selanjutnya, Maarif menyatakan meski tidak diketahui siapa yang mencetuskan pertama kali istilah politik identitas, namun demikian, secara substansif istilah ini merujuk pada kepentingan para anggota dari berbagai kelompok sosial yang merasa keberadaan mereka tidak diperlakukan secara adil, diperas, dan tersingkirkan oleh dominasi kelompok lain yang lebih besar dalam sebuah bangsa atau negara.

Berdasarkan penjelasan diatas, tampaknya praktek ketidakadilan atau pemerasan memiliki korelasi dalam membangun kesadaran bagi kelompok tertindas untuk bangkit dan bergerak atas nama identitasnya. Buchari (2014:20) menyatakan bahwa politik identitas merupakan alat perjuangan suatu etnis untuk mencapai tujuan tertentu, dimana kemunculannya disebabkan karena faktor tekanan berupa perlakuan tidak adil yang dirasakan kelompok etnis. Sejalan dengan hal tersebut, Kristianus (2009:255) menyatakan bahwa perjuangan politik identitas merupakan perjuangan kelompok atau orang-orang yang terpinggirkan,

baik secara politik, sosial, maupun budaya dan ekonomi. Terkait dengan hal tersebut, kelompok-kelompok identitas yang tertindas di Amerika pada waktu itu merupakan masyarakat kulit hitam, masyarakat berbahasa spanyol, dan etnis lain yang termarjinalkan oleh perlakuan dominasi golongan kelompok kulit putih, pada akhirnya mereka bergerak bersama untuk menuntut keadilan, kebebasan dan kesetaraan. Pergolakan politik identitas serupa juga pernah terjadi di beberapa negara lain di dunia, seperti yang terjadi di Quebec dimana masyarakatnya yang berbahasa Prancis menuntut untuk memisahkan diri dari Kanada yang kebanyakan masyarakatnya berbahasa Inggris, konflik identitas ini terjadi karena perbedaan budaya. Selain itu, Gutman (2003:168) juga menyatakan bahwa gerakan yang dilakukan oleh Martin Luther King dan uskup-uskup katolik di Amerika sejatinya merupakan gerakan yang juga menuntut keadilan dan bukan karena bermuatan pada perbedaan pandangan agama.

Merujuk pendapat dari para ahli, politik identitas secara terminologi sering kali dipertukarkan yaitu identitas politik dan politik identitas. Namun, dari dua kata tersebut pada dasarnya memiliki pengertian yang sama yaitu keduanya merujuk pada bentuk mobilisasi politik atas dasar identitas kolektif yang sebelumnya sering disembunyikan, ditekan, atau diabaikan, baik oleh kelompok dominan yang terdapat dalam sistem demokrasi liberal atau oleh agenda politik kewarganegaraan yang diusung atas nama demokrasi (Afala, 2018:13). Berger seperti dikutip oleh Ode (2012:40), menjelaskan bahwa identitas seseorang mewujudkan dalam berbagai identitas umum, seperti identitas pribadi, identitas nasional, pekerjaan, badan

hukum, jenis kelamin dan agama.

Sedangkan, Hiplunudin (2017:12) menyatakan bahwa politik identitas berfokus pada perbedaan sebagai hal yang utama. Artinya, politik identitas memberikan garis tegas untuk menentukan siapa yang akan disertakan dan siapa yang akan ditolak karena garis penentuan tersebut tidak dapat dirubah. Gittlin seperti dikutip Gutmann (2009:20) menyatakan politik identitas merupakan perjuangan untuk mengubah warna dari ketidaksetaraan. Terkait dengan hal tersebut, Hiplunudin (2017:13), menjelaskan bahwa politik identitas menjanjikan kebebasan dan toleransi, walaupun tidak jarang hal tersebut memunculkan pola-pola intoleransi, kekerasan dan pertentangan etnis. Politik identitas mencakup rasisme, bio-feminisme, environmentalism atau politik isu lingkungan, perselisihan etnis.

Kauffman (2001:23) menterjemahkan politik identitas tersebut sebagai visi dan praktik dari politik radikal. Lebih lanjut, menurut Kauffman politik identitas bukan sekedar pengakuan atas identitas kolektif, namun politik identitas juga terkait dengan tindakan diskriminasi yang dilakukan oleh kelompok maupun institusi. Pada level ekstrim politik identitas mengarah ke tindakan-tindakan separatisme (Hiplunudin, 2017:15). Tujuan akhir dari politik identitas adalah perebutan kekuasaan politik berdasarkan identitas etnis maupun agama (Buchari, 2014:20). Lebih lanjut, Buchari menyatakan esensi dari politik identitas adalah upaya untuk mencapai kekuasaan dalam politik, dimana pengakuan dan keberadaan wakil-wakil dari kelompok etnis merupakan bagian penting dari perjuangan politik yang dilakukan demi kepentingan kelompok etnisnya.

Lebih lanjut, menurut Appiah seperti dikutip Afala (2018:16), terdapat tujuh cara berbeda untuk menjelaskan politik identitas, yaitu: Pertama, terdapat konflik politik antara kelompok yang berada didalam dan kelompok yang berada diluar. Kedua, para politisi memobilisasi identitas. Ketiga, tindakan diskriminatif yang dilakukan oleh pemerintah dalam memperlakukan masyarakat. Keempat, rakyat mengejar politik pengakuan. Kelima, menjadi mikropolitik sosial yang memaksakan norma-norma dalam pengidentifikasian. Keenam, adanya identitas politik yang secara inherent sama dengan pengidentifikasian partai. Ketujuh, kelompok sosial bisa memobilisasi untuk merespon secara kolektif terkait dengan semua hal diatas. Berdasarkan penjelasan diatas maka, politik identitas secara eksplisit menjelaskan cara dimana identitas bersifat politis. Selain itu, identitas juga dapat diartikan sebagai interrelasi yang tak bisa dipisahkan dari berbagai aspek lain termasuk aspek politik.

Salah satu eksistensi manusia yang muncul dari pemanfaatan fotografi adalah penggunaan fotografi dalam dunia politik yang selanjutnya disebut dengan foto politik. Foto politik memainkan peranan penting dalam komunikasi politik. Penggunaan foto dalam politik tidak saja membuat pesan politik menjadi lebih menarik, tetapi juga membuatnya lebih mudah dipahami dan diingat. Foto politik tidak saja tampil dalam media massa dengan berbagai platform, tetapi juga tampil dalam bentuk yang lain seperti baliho, poster dan akun media sosial dari politisi maupun partai politik untuk kepentingan propaganda. Sedangkan, dari sisi peristiwa, pemilu, kampanye dan demonstrasi merupakan sebagian dari objek yang sering digambarkan dalam foto politik.

Fotografi sebagai media rekam memiliki kemampuan dalam merekam suatu peristiwa secara sederhana, apa adanya dan sesuai dengan aslinya. Selain itu, kemampuan fotografi juga tampak dari melalui kekuatan visual persuasifnya mampu mempengaruhi individu mengenai subjek yang digambarkannya, misalnya: Seorang pembaca dapat merasakan suatu peristiwa setelah melihat foto-foto demonstrasi politik di surat kabar atau seorang pembaca dapat memahami arti foto pemimpin politik setelah melihat senyum dan gerak tubuhnya. Fotografi memiliki kekuatan besar dalam aspek ikonisitas. Kekuatan ikonisitas yang diciptakan fotografer dapat mempengaruhi dan membentuk opini publik, hal ini terpusat pada atribut karakter dari para aktor-aktor politik. Penggambaran visual para pemimpin dapat diartikan sebagai pengalaman nonverbal yang disimulasikan, sehingga menjadi sumber informasi dan atribusi yang kuat. Tampilan wajah adalah pusat dari informasi dan pemahaman nonverbal. Foto politik berupa foto debat dan gambar-gambar lain dari para kandidat serta pemimpin politik selalu menonjolkan wajah mereka.

Penelitian ini akan menggunakan konsep analisa pesan visual Paul Martin Lester. Analisa pesan visual ini menekankan pada enam perspektif untuk mengungkap pesan yang ingin disampaikan oleh produser (fotografer). Langkah analisa pesan visual ini dilakukan dengan dua tahap yaitu Pertama, membuat daftar elemen konten yang mencakup, inventarisir objek keseluruhan secara detil, elemen komposisi, dan mempelajari isyarat visual, bentuk, kedalaman, serta gerakan atau gesture di dalam gambar. Kedua, menganalisa foto berdasarkan enam perspektif yaitu personal, sejarah,

teknik, etika, budaya dan kritik.

Menurut Lester (2003:108-114), enam perspektif yang dipergunakan dalam analisa pesan visual ini masing-masing memiliki cara pandang yang dapat memperkaya dalam mengungkap makna pesan yang terdapat pada suatu foto. Lebih lanjut, Lester menjelaskan enam perspektif sebagai berikut:

1. Personal Perspektif

Merupakan perspektif yang menekankan pada cara pandang individu atau seseorang dalam melihat atau menginterpretasi foto. Interpretasi yang dihasilkan dari pengamatan seseorang ini biasanya dipengaruhi dari pengalaman visual yang pernah dialami orang tersebut baik positif maupun negatif. Untuk mendapatkan analisa yang mendalam dari perspektif ini seorang peneliti harus menggunakan pendekatan omniphasism yang diperkenalkan oleh Rick Williams. Williams seperti dikutip Lester (2003:110) menggunakan delapan langkah tehnik analisa yang disebut dengan "*personal impact assessment*". Delapan perangkat tersebut adalah: Pertama, meluangkan waktu untuk melihat gambar atau foto yang akan dianalisa. Langkah ini berfungsi untuk melihat apakah gambar tersebut dapat menstimulasi imajinasi atau malah menjauhkan. Selain itu, langkah pertama ini juga digunakan untuk membantu melihat cerita apa yang ingin disampaikan dalam foto tersebut. Kedua, langkah ini dilakukan dengan membuat daftar kata-kata utama, misalnya dengan menuliskan satu kata yang menggambarkan isyarat visual, objek

dan perasaan yang Anda dapatkan ketika melihat gambar. Ketiga, menuliskan kata-kata asosiatif, tuliskan asosiasi dari kata apa saja yang muncul di pikiran setelah memikirkan setiap kata utama. Keempat, langkah ini merupakan pemilihan kata dari sejumlah kata yang sudah diasosiasikan. Pemilihan satu kata asosiatif ini harus dilakukan secara cepat dan tepat serta paling penting menurut peneliti. Kelima, langkah berikutnya meletakkan kata asosiatif primer dan signifikan menjadi berpasangan. Menggabungkan kata-kata utama dengan kata asosiatif yang paling signifikan. Keenam, hubungan pasangan kata asosiatif primer dan signifikan untuk diri sendiri. Setelah itu tuliskan apa yang dilambangkan atau diwakili dari setiap penggabungan kata asosiatif primer dan signifikan menurut peneliti. Ketujuh, merupakan langkah yang meninjau simbolisme batiniah. Pada langkah ini peneliti meninjau kata-kata dan frasa simbolis. Selain itu, peneliti juga akan melihat apakah mereka mengungkapkan konflik batin, emosi, nilai, atau perasaan yang peneliti miliki tentang gambar tersebut. Kedelapan, merupakan langkah terakhir yang dilakukan untuk melakukan analisis dari perspektif personal. Langkah ini dilakukan dengan menuliskan atau menceritakan secara detail hasil dari analisa personal berdasarkan wawasan yang dimiliki oleh peneliti. Setelah peneliti melakukan langkah yang mencakup komposisi, konten dengan pendekatan omniphasing, analisa selanjutnya

dilakukan dengan lima perspektif lainnya.

2. Perspektif Sejarah

Perspektif sejarah ini merupakan analisa yang dilakukan untuk mengkaitkan visual yang dianalisis dengan sejarah perkembangannya. Hal ini dilakukan karena asumsi bahwa berbagai macam media yang berkembang atau yang dianalisa pada saat ini tidak bisa lepas dari sejarahnya. Aspek sejarah ini ditinjau dari sisi teknik produksi, filosofi yang digunakan dan aspek aplikasinya. Perspektif ini melihat apakah ada kesamaan aspek atau gaya yang ditiru dalam menyajikan karya-karya visual.

3. Perspektif Teknik

Pada perspektif ini peneliti harus memiliki pengetahuan tentang bagaimana suatu medium visual dipresentasikan. Hal ini dilakukan agar peneliti dapat melakukan kritik menyeluruh terhadap bentuk presentasi visual tentang bagaimana seorang produser visual menghasilkan karya-karyanya. Dengan memiliki pengetahuan cukup maka seorang peneliti berada pada posisi untuk bisa menilai apakah visual yang diproduksi memiliki nilai yang tinggi atau rendah.

4. Perspektif Etika

Perspektif etika merujuk pada enam prinsip filosofi etika yang digunakan sebagai pijakan dalam menganalisa visual. Enam etika tersebut antara lain: Pertama, Kategorial imperative berdasarkan pada pandangan filsuf Immanuel Kant, yang menyatakan bahwa kategorial merupakan kondisi tidak bersyarat

tanpa mempertanyakan hal-hal yang meringankan tanpa terkecuali. Benar adalah benar dan harus dilakukan bahkan dalam kondisi yang paling ekstrim. Hal ini biasanya terjadi pada foto-foto jurnalistik. Kedua, utilitarianisme, pandangan utilitarianisme dikembangkan oleh filsuf, John Stuart Mill dan Jeremy Bentham. Kedua filsuf ini percaya bahwa kebaikan berada pada jumlah masyarakat yang besar. Artinya, menurut pandangan utilitarianisme walau ada berbagai macam resiko kondisi yang mungkin terjadi dalam melakukan suatu tindakan tertentu, keputusan harus mengutamakan kebaikan untuk orang banyak. Ketiga, Hedonisme, etika ini merupakan pandangan yang mengacu pada kesenangan. Pandangan ini berasal dari seorang filsuf, Aristippus yang menyatakan agar masyarakat memaksimalkan tindakan untuk mencapai kesenangan dan tidak mengkhawatirkan masa depan. Kesenangan yang dimaksud oleh Aristippus adalah kesenangan dalam konteks intelektual dan bukan sensasi fisik. Aristippus merasa masyarakat sebaiknya mengejar intelektualitas mereka, sehingga dalam membina hubungan pribadi dengan individu lain bisa memberikan penilaian dan pendapat yang baik. Dalam konteks visual pandangan ini terjadi pada produser visual yang selalu mempertimbangkan untuk menampilkan kesenangan estetika didalam visual yang mereka ciptakan. Keempat, *Golden mean* merupakan pandangan etika yang

mengacu pada pandangan dari filsuf Aristoteles untuk mencari jalan tengah dan kompromi diantara dua titik ekstrim pandangan dan tindakan yang berbeda. Dalam perspektif *golden mean*, kompromi dan negosiasi merupakan cara untuk mendapatkan solusi dari dua kepentingan saling berlawanan. Etika menurut *golden mean* dapat diterapkan ketika produser visual dihadapkan pada dua pilihan untuk menampilkan karya visual. Misalnya perdebatan dalam menentukan satu materi visual akan dipublikasi dalam bentuk cetak atau siaran pada media televisi. Produser yang berpikir berdasarkan pada pandangan *Golden mean* dapat memberikan solusi atau alternatif jalan keluar dari perdebatan tersebut. Kelima, *Golden rule* merupakan etika yang mengajarkan kepada masyarakat untuk mencintai orang lain, seperti mencintai diri sendiri. Pandangan yang berasal dari tradisi kuno Kristen ini mengajarkan agar setiap individu memiliki sifat humanis dengan tidak melakukan tindakan-tindakan yang merugikan orang lain. Pada praktek di media, etika *golden rule* dapat dilihat dari keputusan seorang editor yang tidak menampilkan gambar-gambar yang tampak mengeksploitasi kesedihan dari korban yang tertimpa musibah tertentu. Keenam, *veil ignorance*, etika yang terakhir ini merupakan pandangan yang melihat bahwa semua manusia merupakan individu yang sama. Lebih lanjut, etika ini merasa bahwa tidak ada kelas sosial dari masyarakat yang berhak untuk mengambil keuntungan dan merasa

lebih unggul dibanding masyarakat lainnya. Dalam konteks analisa visual, etika ini mempertanyakan apakah dalam suatu visual yang ditampilkan secara luas memenuhi aspek tanggung jawab sosial? Apakah dalam visual tersebut terdapat hak individu yang dilanggar? Pertanyaan-pertanyaan tersebut mengarah agar visual yang ditampilkan memiliki kualitas yang baik dan tentunya tetap memperhatikan serta tidak melanggar hak yang dimiliki setiap individu.

5. Perspektif Budaya

Perspektif budaya digunakan untuk mengidentifikasi simbol yang ditampilkan pada media visual dan mencoba untuk menentukan maknanya bagi masyarakat luas. Simbol-simbol ini dapat dianalisis melalui penggunaan simbol baik atau buruk. Struktur narasi, gaya, atau penggunaan kata-kata yang digunakan untuk menyertai visual merupakan hal yang dianalisa dari perspektif ini. Selain itu, sikap subjek dan budaya yang coba dikomunikasikan oleh produser juga hal lain yang harus menjadi perhatian dalam perspektif budaya.

6. Perspektif Kritis

Perspektif kritis merupakan perspektif yang memungkinkan bagi peneliti untuk menggunakan informasi yang dipelajari tentang media, praktisi dan visual yang dihasilkannya. Berdasarkan hal tersebut peneliti dapat membuat komentar yang lebih umum dan melakukan kritik terhadapnya menerima atau menolak gambar.

Dalam melakukan analisa terkait dengan makna pesan dalam foto deklarasi tersebut, penelitian ini menggunakan teori konstruksi sosial. Konstruksi sosial merupakan teori yang diperkenalkan oleh Peter L Berger dan Thomas Luckmann (Sobur, 2009:91). Berger dan Luckmann memulai penjelasan realitas sosial dengan memisahkan pemahaman tentang "kenyataan" dan "pengetahuan" (Sobur, 2009:91). Dua istilah inilah yang menjadi kunci teori konstruksi sosial. Kenyataan merupakan realitas yang terdapat dalam fenomena-fenomena yang memiliki keberadaan (*being*) yang tidak bergantung pada kehendak individu manusia. Sedangkan, pengetahuan adalah kepastian bahwa realitas-realitas itu nyata (*real*) dan memiliki karakteristik yang spesifik (Sobur, 2009:91). Selain itu, mereka juga menjelaskan realitas sosial yang bersifat keseharian seperti konsep, kesadaran umum, dan wacana publik merupakan hasil dari kontruksi sosial (Bungin, 2006:7). Berger dan Luckman seperti dikutip Eriyanto (2011:16) juga menyatakan kenyataan itu sendiri bersifat plural, dinamis dan dialektis. Artinya, realitas atas peristiwa dari seseorang mungkin tidak akan sama dengan realitas orang lain.

Proses dialektis tersebut mempunyai tiga tahapan peristiwa, Berger dan Luckmann (dalam Eriyanto, 2011:16) menyebut tahapan tersebut dengan momen yaitu:

1. Eksternalisasi yakni usaha untuk pencurahan atau ekspresi diri manusia ke dalam dunia, baik dalam kegiatan mental maupun fisik. Ini sudah menjadi sifat dasar dari manusia. Ia akan selalu mencurahkan diri ke tempat dimana ia berada. Pada tahap ini manusia mengalami proses penyesuaian diri dengan dunia sosiokultural sebagai

produk manusia. Dalam konteks ini, menurut Tamburaka (2013:78) informasi dari media massa merupakan produk sosial yang dibutuhkan oleh individu atau khalayak untuk memaknai lingkungan sosialnya.

2. Objektivasi yakni hasil yang telah dicapai baik mental maupun fisik dari kegiatan eksternalisasi. Pencapaian tersebut menghasilkan realitas objektif yang bisa jadi akan menghadapi itu sendiri sebagai suatu aktivitas yang berada diluar dan berlainan dari manusia yang menghasilkannya. Ini adalah tahap interaksi sosial yang terjadi dalam dunia intersubjektif yang dilembagakan atau mengalami proses institusionalisasi. Tahapan objektivasi ini dilakukan dengan signifikasi bahasa (Tamburaka, 2013: 78).

3. Internalisasi proses ini lebih merupakan penyerapan kembali dunia objektif ke dalam kesadaran sedemikian rupa sehingga subjektif individu dipengaruhi oleh struktur dunia sosial. Berbagai macam unsur dari dunia yang telah terobjektifkan tersebut akan ditangkap sebagai gejala realitas diluar kesadarannya, sekaligus sebagai gejala internal bagi kesadaran. Melalui proses internalisasi manusia menjadi hasil dari masyarakat.

Menurut Eriyanto (2011:18) realitas tidak dibentuk secara ilmiah tetapi dibentuk dan dikonstruksikan. Realitas sosial yang dikonstruksi secara berbeda oleh masing-masing individu ini dipengaruhi oleh pengalaman, preferensi, latar belakang pendidikan tertentu, lingkungan pergaulan dan sosial

Hal tersebut sejalan dengan Basrowi, et al (2002:194) yang menjelaskan ketika individu menanggapi kejadian di sekitarnya berdasarkan pengalaman mereka, maka itulah yang disebut dengan konstruksi

realitas secara sosial. Lebih lanjut, Basrowi juga mengemukakan individu yang dimaksud adalah manusia bebas yang melakukan hubungan antara manusia yang satu dengan yang lainnya. Individu menjadi penentu dalam dunia sosial yang dikonstruksi berdasarkan kehendaknya. Ia juga menambahkan bahwa individu bukanlah fakta sosial, namun sebagai media produksi sekaligus reproduksi yang kreatif dalam mengkonstruksi dunia sosialnya (Basrowi, et al 2002:194). Sedangkan, Ngangi (2011:1) dalam tulisannya mengungkapkan konstruksi sosial merupakan sebuah pandangan kepada kita bahwa semua nilai, ideologi dan institusi sosial adalah buatan manusia.

Menurut Berger dan Luckmann (dalam Bungin, 2006:5) rekonstruksi sosial terdiri dari tiga macam yaitu: Pertama, realitas objektif yaitu realitas yang terbentuk dari pengalaman di dunia objektif yang berada diluar diri individu, dan realitas ini dianggap sebagai kenyataan. Kedua, realitas simbolik, merupakan ekspresi simbolik dari realitas objektif dalam berbagai bentuk. Ketiga, realitas subjektif yaitu realitas yang terbentuk sebagai proses penyerapan kembali realitas objektif dan simbolik ke dalam individu melalui proses internalisasi..

Oleh sebab itu sebagai hasil dari konstruksi sosial maka realitas menurut Berger (dalam Eriyanto, 2011:19) memiliki sifat subjektif dan objektif. Selanjutnya, Berger menjelaskan realitas subjektif itu sendiri menyangkut makna, interpretasi, dan hasil relasi antara individu dan objek. Sedangkan, realitas objektif merupakan faktor yang berada diluar atau eksternal. Menurut Ngangi (2011:1) konstruksi sosial juga memiliki beberapa kekuatan yaitu: Pertama, terdapat pada peran sentral bahasa memberikan mekanisme konkret,

dimana budaya mempengaruhi pikiran dan tingkah laku individu. Kedua, konstruksi sosial dapat mewakili kompleksitas dalam suatu budaya tunggal, hal ini tidak mengasumsikan keseragaman. Ketiga, hal ini bersifat konsisten dengan masyarakat dan waktu.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Menurut Kriyantono(2012:60) penelitian kualitatif merupakan suatu proses penelitian dan pemahaman berdasarkan pada metodologi yang menyelidiki fenomena sosial dan masalah manusia. Lebih lanjut, Creswell seperti dikutip Sugiyono (2017:4) menyatakan bahwa penelitian kualitatif merupakan penelitian yang melakukan proses eksplorasi dan memahami perilaku individu dan kelompok, menggambarkan masalah sosial atau masalah kemanusiaan. Tujuan dari penelitian dengan pendekatan kualitatif adalah untuk mencapai pemahaman yang mendalam tentang bagaimana manusia menjalankan atau melakukan proses kehidupannya, bagaimana manusia memberikan makna, dan menguraikan pula tentang bagaimana manusia dapat menginterpretasikan pengalamannya (Sugiyono, 2017:4).

Bungin (2011:140) mengemukakan bahwa penelitian dengan pendekatan metodologi kualitatif memiliki tujuan untuk menganalisa proses berlangsungnya suatu fenomena sosial dan memperoleh gambaran yang tuntas terhadap proses tersebut. Tujuan lainnya, menurut Bungin, menganalisa makna yang ada dibalik informasi data dan proses suatu fenomena sosial itu. Berdasarkan tujuan-tujuan tersebut Bungin (2011:140) membagi tiga kelompok besar metode analisis data kualitatif yaitu: Pertama, kelompok metode analisis teks dan bahasa. Kedua, kelompok

analisis tema-tema budaya dan Ketiga, kelompok analisis kinerja dan pengalaman individu serta perilaku institusi.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan menggunakan analisa pesan visual untuk mengeksplorasi makna dari foto deklarasi kemenangan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden, Joko Widodo dan KH. Maaruf Amin. Pengamatan dilakukan dengan membuat daftar elemen konten yang terdapat didalam foto. Daftar elemen konten tersebut mencakup, inventarisir objek keseluruhan secara detil, elemen komposisi, dan mempelajari isyarat visual, bentuk, kedalaman, dan gerakan di dalam gambar. Selanjutnya, analisa dilakukan dengan menggunakan enam perspektif seperti yang dikemukakan Paul Martin Lester, yaitu Perspektif personal, Perspektif sejarah, perspektif teknik, perspektif etika, perspektif budaya, dan perspektif kritik. Tujuan dari penelitian ini sendiri adalah untuk mengetahui dan menjelaskan keterlibatan fotografer dalam menciptakan pesan visual dalam media visual fotografi. Selain itu, melalui penelitian ini diharapkan dapat menjelaskan pula keterkaitan visual fotografi dalam dunia politik di Indonesia. Sedangkan, bila ditinjau dari segi manfaat penelitian ini dapat memberikan khasanah baru dalam perkembangan ilmu pengetahuan, terutama dalam kajian politik identitas dan komunikasi visual khususnya fotografi.

PEMBAHASAN

Penelitian dilakukan pada foto deklarasi kemenangan dari pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden, Joko Widodo dan KH Ma'ruf Amin. Visual foto ini dianalisis dengan menggunakan metode analisis pesan visual dari Paul Martin Lester yang dibagi menjadi dua

tahap, Pertama membuat daftar elemen konten tersebut mencakup, inventarisir objek keseluruhan secara detil, elemen komposisi, dan mempelajari isyarat visual, bentuk, kedalaman, dan gerakan di dalam gambar. Lalu, kedua melakukan analisis terhadap foto tersebut berdasarkan analisa pesan visual dengan menggunakan enam perangkat utama perspektif analisa pesan visual, yaitu: Perspektif personal, Perspektif sejarah, perspektif teknik, perspektif etika, perspektif budaya, dan perspektif kritik.

Berdasarkan pada pengamatan pada elemen konten yang terdapat pada foto deklarasi kemenangan dari pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden, Joko Widodo dan KH Ma'ruf Amin maka memperoleh data sebagai berikut:

Tabel 1. Daftar Elemen Konten pada Foto deklarasi kemenangan dari pasangan calon Presiden dan

Wakil Presiden, Joko Widodo dan KH Ma'ruf Amin

1.	Elemen visual	Masyarakat bawah, perempuan, pria, anak-anak sekolah, tentara, gawai, baju sekolah, busana sehari-hari, jilbab, perumahan padat penduduk, topi, peci, kacamata
2.	Komposisi Foto	Posisi fotografer <i>eye level</i> dengan memanfaatkan komposisi <i>rule of third</i> dimanaposisi pasangan calon presiden dan wakil presiden berada diposisi sebelah kanan, posisi tersebut merupakan perpotongan antara garis <i>grid display</i> vertikal dan horisontal. Dalam fotografi komposisi ini memiliki tujuan untuk menonjolkan objek atau juga disebut dengan <i>point of interest</i> . Pencahayaan normal, ada bayangan diposisi sebelah kanan, namun tidak begitu mempengaruhi dimensi gelap terang pada foto.

3.	Warna, bentuk, dan gerakan pada foto	Foto secara keseluruhan menampilkan nuansa warna-warni, satu-satunya warna yang menonjol adalah warna putih dari kemeja yang dikenakan oleh pasangan capres dan cawapres. Gerakan dalam foto tidak ada yang menonjol, rata-rata subjek yang terekam menunjukkan sopan santun dengan memosisikan tangan berada dibawah. Foto memiliki kedalaman karena memperlihatkan hubungan yang akrab dari calon presiden dengan rakyatnya.
4.	Lokasi dan tujuan	Pemotretan berada ditengah jalan di lokasi pemukiman padat penduduk, tujuan dari pengambilan foto ini sendiri untuk keperluan publikasi media.

Sedangkan, berdasarkan pada enam perspektif data analisis yang diperoleh sebagai berikut:

1. Perspektif Personal

Penampilan foto deklarasi ditinjau secara visual menghadirkan suasana yang sangat menarik. Walaupun foto ini merupakan foto yang dipersiapkan sebagai materi dalam pemberitaan di media, namun foto ini memperlihatkan suatu konsep yang telah dipersiapkan dengan matang. Foto ini dapat diasosiasikan sebagai gambaran tentang hubungan, simpati dan politik. Hubungan atau relasi yang "cair" dari foto ini tampaknya ingin menampilkan suatu hubungan yang tidak memiliki jarak dan sangat akrab. Simpati dapat diterjemahkan sebagai suatu sikap atau tindakan rendah hati. Sedangkan, politik merupakan kata yang selalu diasosiasikan dengan tindakan yang dilakukan oleh politisi untuk mendapatkan kekuasaan. Berdasarkan pada tiga kata asosiasi yang muncul dari foto tersebut maka pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden, Joko Widodo dan KH Ma'ruf Amin memiliki

strategi pendekatan yang unik dan tergolong baru dalam perkembangan politik modern di Indonesia. Politik selama ini selalu diidentikkan dengan para elite yang tidak tersentuh dan baru menunjukkan kepeduliannya menjelang atau ketika masa pemilu tiba. Politik di Indonesia juga kerap memperlihatkan elite-elite politik yang memberikan janji-janji palsu. Dengan pemimpin yang hadir dalam bentuk pendekatan yang tidak biasa seperti yang tampak dalam foto deklarasi kemenangan tersebut menjadi indikasi bahwa para elite politik Indonesia saat ini mulai memikirkan cara-cara yang unik untuk melakukan pendekatan kepada rakyat.

2. Perspektif Sejarah

Perspektif sejarah mencoba menganalisa kemungkinan kesamaan teknik atau gaya dalam menampilkan foto. Berdasarkan hal tersebut bila melihat foto yang disajikan dalam deklarasi kemenangan calon Presiden dan Wakil Presiden, Joko Widodo dan KH Ma'ruf Amin secara teknik dalam fotografi tidak ada sesuatu yang baru. Teknik, sudut pandang, komposisi dan posisi fotografer merupakan posisi yang normatif dalam fotografi. Lebih lanjut, hal yang bisa dikaitkan dalam konteks sejarah bisa dilihat dari model pendekatan atau konsep yang digunakan sebagai strategi dalam politik. Hal ini mengacu pada aktifitas yang kerap dilakukan oleh Presiden RI pertama Ir. Soekarno yang memiliki kedekatan khusus dengan rakyat, banyak sekali momen foto yang memperlihatkan bahwa Ir Soekarno sangat dicintai dan dekat dengan rakyat. Konsep inilah yang dicoba untuk ditiru dan diharapkan dapat membangun citra yang sama seperti Ir Soekarno.

3. Perspektif Teknik

Foto deklarasi kemenangan calon Presiden dan Wakil Presiden, Joko Widodo dan KH Ma'ruf Amin secara teknik fotografi menggunakan komposisi *point of interest*, dimana subjek utama dalam foto tersebut ditempatkan pada posisi yang mampu menarik perhatian mata. Subjek utama yaitu calon Presiden dan Wakil Presiden, Joko Widodo dan KH Ma'ruf Amin ditempatkan tepat pada perpotongan garis horisontal dan vertikal pada *grid display*. Kualitas yang ditampilkan baik, gambar fokus dan sangat memperhatikan aspek-aspek fotografis lainnya seperti pengukuran cahaya yang tepat.

4. Perspektif Etika

Foto deklarasi kemenangan calon Presiden dan Wakil Presiden, Joko Widodo dan KH Ma'ruf Amin ditinjau berdasarkan pada sisi etika sejalan dengan etika normatif yang dijelaskan oleh John Stuart Mill dan John Bentham. Dalam etika normatif atau populer disebut dengan utilitarianisme merupakan etika yang mengacu pada kebermanfaatannya yang ditujukan bagi orang banyak. Foto yang ditampilkan pada saat deklarasi kemenangan calon Presiden dan Wakil Presiden, Joko Widodo dan KH Ma'ruf Amin menunjukkan keberpihakan kepada masyarakat luas yang ditampilkan dengan hadirnya masyarakat yang mewakili golongan bawah untuk hadir pada deklarasi kemenangan.

5. Perspektif Budaya

Berdasarkan pada foto deklarasi kemenangan calon Presiden dan Wakil Presiden, Joko Widodo dan KH Ma'ruf Amin terdapat sejumlah simbol-simbol yang dapat menambah makna dari foto tersebut. Simbol-simbol tersebut antara

lain busana yang dikenakan oleh calon wakil presiden, KH Ma'ruf Amin seperti peci, baju gamis, dan sarung. Peci, baju gamis dan sarung merupakan simbol budaya yang memiliki makna sebagai identitas dari seorang muslim. Simbol lain adalah beberapa warga yang hadir pada saat itu menggunakan jilbab. Selain itu, tampak juga beberapa warga dengan menggunakan gawainya melakukan dokumentasi terhadap momen tersebut dan ada pula yang melakukan *selfie*.

6. Perspektif Kritis

Foto ini memiliki konsep yang sangat menarik, sosok calon Presiden dan Wakil Presiden, Joko Widodo dan KH Ma'ruf Amin, ditampilkan sangat merakyat dan tidak memiliki jarak sama sekali dengan rakyatnya. Namun demikian bila menilik lebih jauh, foto-foto dalam konteks politik memiliki kecenderungan untuk memanfaatkan warga masyarakat kalangan bawah sebagai salah satu cara untuk mendapatkan citra yang baik dimata masyarakat luas. Pencitraan yang dilakukan oleh para politisi bagian untuk menjaga agar reputasi mereka tetap baik. Asal dilakukan dalam tahap wajar dan tidak kebablasan pencitraan politik merupakan sesuatu yang biasa dilakukan.

Menurut hasil analisis pesan visual Paul Martin Lester terhadap foto deklarasi kemenangan dari pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden, Joko Widodo dan KH Ma'ruf Amin, menunjukkan bahwa penciptaan makna melalui karya fotografi ini memiliki konsep yang sangat menarik. Karya yang ditampilkan berdasarkan perspektif personal dapat diasosiasikan dengan hubungan relasi, simpati dan politik sebagai konteksnya. Selain itu, pada perspektif sejarah, tampaknya citra dari sosok Presiden pertama Indonesia, Ir

Soekarno yang dikenal sangat dekat dan dihormati rakyatnya ingin ditampilkan dalam foto deklarasi ini. Masyarakat Indonesia seakan diajak untuk kembali ke sejarah dan melihat bahwa saat ini Indonesia memiliki calon Presiden yang sosok dan tindakannya mirip dengan apa yang kerap dilakukan oleh Soekarno.

Selain dari konsep yang telah dijelaskan diatas indikasi lain bahwa foto deklarasi ini dipersiapkan dengan baik adalah secara teknis foto ini memiliki kualitas yang baik. Hal tersebut dapat dilihat dari komposisi, pencahayaan dan warna putih yang mampu menyita perhatian. Ditinjau dari segi konten foto ini tampaknya ingin menyampaikan pesan kebersamaan dengan tidak menampilkan warna-warna yang seragam. Tetapi, yang ditampilkan justru keberagaman yang tampak dalam nuansa warna-warni dari busana yang dikenakan oleh masyarakat pada saat itu. Satu-satunya warna yang mendominasi adalah warna putih dan hanya dikenakan oleh pasangan calon presiden dan wakil presiden. Baju muslim yang tampak dikenakan oleh beberapa orang hadir pada saat momen tersebut juga mengisyaratkan bahwa ada identitas agama yang dibawa dalam acara tersebut.

Berdasarkan pada hasil analisa dan pembahasan maka pesan atau makna yang ingin disampaikan melalui foto deklarasi kemenangan calon Presiden dan Wakil Presiden, Joko Widodo dan KH Ma'ruf Amin terutama terkait dengan konstruksi politik identitas adalah bahwa melalui foto tersebut tampaknya pasangan ini mengusung identitas nasionalis religius atau Islam nusantara yang dekat dengan rakyat. Kedekatan dengan rakyat yang berada dipemukiman padat penduduk merupakan bentuk sikap keberpihakan kepada masyarakat kelas bawah.

SIMPULAN

Berdasarkan pada hasil penelitian dan pembahasan diatas maka medium visual fotografi merupakan medium yang dipergunakan sebagai media penyampaian pesan yang efektif. Kelebihan fotografi yang dapat merekam secara realistis dimanfaatkan sebagai media pencitraan bagi para politisi. Pencitraan dilakukan dengan merencanakan konsep yang secara matang, menghadirkan elemen-elemen yang menarik, artistik sekaligus memiliki pesan tertentu yang ingin disampaikan.

Fotografi pada konteks politik juga diaplikasikan ke berbagai media seperti media massa, billboard, pamflet dan media sosial. Penggunaan fotografi sangat efektif karena dapat mempengaruhi dan memiliki dampak atau pengaruh untuk membentuk opini publik atau pemilih, apabila realitas dari sebuah isu dikonstruksi dan diberitakan secara terus menerus oleh media. Deklarasi kemenangan calon Presiden dan Wakil Presiden, Joko Widodo dan KH Ma'ruf Amin memiliki pesan bahwa keberhasilan mereka dalam memenangkan kontestasi pemilu merupakan kemenangan bersama seluruh rakyat Indonesia. Berdasarkan pada kesimpulan penelitian diatas maka, peneliti merekomendasikan untuk melanjutkan penelitian lebih lanjut dengan melakukan penelitian bertajuk pertarungan wacana politik identitas yang terdapat pada foto jurnalistik.

KEPUSTAKAAN

Buku

- Afala, Laode Machdani. (2018). *Politik Identitas di Indonesia*. Jakarta:UB Press.
- Bungin, M. Burhan. (2007). *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Kencana Prenada Media.

- Buchari, Sri Astuti. (2014). *Kebangkitan Etnis menuju Politik Identitas*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Basrowi dan Sukidin. (2003). *Metode Penelitian Perspektif Mikro: Grounded Theory, Fenomenologi, Etnometodologi, Etnografi, Dramaturgi, Interaksi Simbolik, Hermeneutik, Kontruksi Sosial, Analisis wacana, dan Meteodologi Refleksi*. S u r a b a y a : Insan Cendekia.
- Bungin, M. Burhan. (2007). *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Eriyanto. (2011). *Analisis Framing : Konstruksi, Ideologi dan Politik Media*. Yogyakarta: Lkis.
- Kriyantono, Rachmat. (2012). *Teknik Praktis Riset Komunikasi*. Jakarta: Kencana.
- Lester, Paul Martin. (2003). *Visual Communication: Images With Messages 3rd Edition*, Belmont, Amerika Serikat: Thomson Wadsworth
- Lester, Paul Martin. (2003). *Visual Communication: Images With Messages 3rd Edition*. Belmont, Amerika Serikat: Thomson Wadsworth.
- Maarif, Ahmad Syafii. (2010). *Politik Identitas dan Masa Depan Pluralisme Kita*, Pusat Studi Agama dan Demokrasi (PUSAD). Jakarta
- Ode, M.D La. (2012). *Etnis Cina Indonesia dalam Politik: Politik Etnis Cina Pontianak dan Singkawang di Era Reformasi 1998-2008*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Ogilvy, David. (2007). *Ogilvy on Advertising*, United State of America: Prion Books, Ltd.
- Poloma, Margareth. (2004) *Sosiologi Kontemporer*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Puspoyo, Widjanarko. (2012). *Dari Soekarno hingga Yudhoyono: Pemilu Indonesia 1955-2009*. Jakarta: Era Adicitra Intermedia.
- Soejatmiko, Budiman. (2010). *Politik Aliran dalam Pancasila: Keniscayaan Sejarah dan Antitesis Fundalisme*, Pusat Studi Agama dan Demokrasi (PUSAD).

Jakarta

- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta,
- Sontag, Susan. (2005). ebook ed, *On Photography*. New York, US: Rosetta Books, LLC,
- Soedjono, Soeprapto. (2007). *Pot-Pourri Fotografi*. Jakarta: Penerbit Universitas Trisakti
- Sobur, Alex. (2009). *Analisis Teks Media: Suatu Pengantar untuk Analisis Wacana, Analisis Semiotik, dan Analisis Framing*. Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Tamburaka, Apriadi. (2013). *Agenda Setting Media Massa*. Depok: PT Rajagrafindo Persada.
- Weston, Edward. (1966). "Seeing Photographically", in Nathan Lyons ed., *Photographers on Photography*, New York: Prentice-Hall

Jurnal

- Ngangi, Charles R, 2011, *Konstruksi Sosial dalam Realitas Sosial*, ASE Journal, Vol.7, No.2, Mei 2011.

